

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN TAMAN NASIONAL TESSONILO

Shrimanti Indira Pratiwi

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang

Telp: 0341-553898

Fax: 0341- 566505

Email: thita_indira@outlook.co.id

Abstract

TNTN whereabouts has been considered as a harm by local inhabitants because they could no longer work on their ancestral land whether it is the forest, the farm, and also their ancestral graves which were included as the part of TNTN area. This is due to the permit of establishment which was never been given by the local inhabitants. The information they ever get was only about reforestation, not about a request for the permit of establishment of TNTN. The purpose of research is intended to identify and analyze a dispute and settlement solution between indigenous people with TNTN. This research is using the juridical empirical method and juridical sociological approach.

According to the research, the dispute between indigenous people and Tesso Nilo National Park at Air Hitam Village, was started at the year 2004 when the Government assigned Tesso Nilo forest area as the national park, while the local indigenous people were very dependent on the forest. There has been no real resolution on the field, which means there are no legal protection yet for the Batin Putih indigenous people. Dispute resolution for this case could be done through mediation, such as: (1) to involve or hire the local inhabitants as rangers for the national park, (2) to empower the local inhabitants through the management of non-timber forest products such as honey from sialang tree which could be found easily in TNTN area, (3) to empower the local inhabitants by establishing resort or inn nearby the area of TNTN.

Key words: *Communal land, dispute resolution, indigenous people*

Abstrak

Keberadaan TNTN di anggap merugikan oleh penduduk sekitar karena dengan adanya TNTN mereka tidak bisa mengusahakan kembali tanah leluhur mereka baik yang masih berupa hutan, kebun dan juga makam nenek moyang yang masuk kedalam kawasan TNTN. Hal ini di sebabkan oleh izin pendirian yang tidak pernah diberikan oleh masyarakat setempat, mereka hanya diberi

sosialisasi tentang reboisasi bukan perizinan untuk pemancangan tata batas TNTN. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa sengketa yang terjadi dan solusi penyelesaiannya antara masyarakat hukum adat dengan TNTN. Dalam pennisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan bermula ketika tahun 2004 pemerintah menetapkan kawasan hutan tesso nillo sebagai Taman Nasional Tesso Nillo padahal di dalam kawasan hutan tersebut masyarakat adat petalangan batin putih menngantungkan kehidupannya dan penyelesaian yang terjadi dilapangan belum ada sehingga belum memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat batin putih serta model penyelesaian sengketa yang tepat antara mayarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo dapat dilakukan melalui mediasi dengan solusi penyelesaian sebagai berikut: (1) melibatkan atau mengambil masyarakat sekitar menjadi polisi hutan yang bertugas untuk menjaga Taman Nasional, (2) memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu misalnya madu dari pohon sialang yang banyak tumbuh di TNTN, (3) memberdayakan masyarakat dengan membuat resort atau penginapan di sekitar TNTN.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, tanah ulayat, masyarakat hukum adat

Latar Belakang

Desa Air Hitam merupakan salah satu desa di Kabupaten Pelalawan yang mayoritas mata pencahariannya adalah bercocok tanam, di desa tersebut juga ditinggali oleh sekelompok mayarakat adat yakni Petalangan Batin Putih yang masih memiliki kebun dan juga makam nenek moyang di desa tersebut. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Pelalawan yang masih menegakkan panji-panji adat Melayu, di Kabupaten Pelalawan sendiri terdapat dua jenis lembaga adat, yang pertama lembaga adat Petalangan yang mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal), dan lembaga adat Pesisir yang mengikuti garis keturunan bapak (patrilineal), demikian juga dengan tanah ulayat hanya masyarakat adat Petalangan saja yang masih memiliki tanah ulayat, sementara masyarakat Pesisir tanah-tanah yang dimiliki warga merupakan pemberian sultan (grand sultan).

Taman Nasional Tesso Nilo (untuk selanjutnya disebut TNTN) awalnya adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) PT Dwi Marta, PT Inhutani dan PT Nanjak Makmur. Perusahaan tersebut diberi izin pemerintah melalui

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 292 /Kpts-II/2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu (IUPHHK dan atau IUPHHBK) di Hutan Produksi Dengan Koperasi, untuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK-HA/HPH). TNTN ditetapkan sebagai taman nasional melalui perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas seluas 83.068 hektar oleh Kementerian Kehutanan. Tahap pertama berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha. Tahap berikutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas kurang lebih 44.492 hektar. Wilayah TNTN mayoritas luasnya terletak di Provinsi Pelalawan yakni di secara Administratif berada di Kabupaten Pelalawan sementara itu sebagian kecilnya berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Pelalawan.

Keberadaan TNTN di anggap merugikan oleh penduduk sekitar karena dengan adanya TNTN mereka tidak bisa mengusahakan kembali tanah leluhur mereka baik yang masih berupa hutan, kebun dan juga makam nenek moyang yang masuk kedalam kawasan TNTN, karena TNTN melarang pihak luar baik orang maupun binatang masuk kedalam kawasan konservasi TNTN. Hal ini di sebabkan oleh izin pendirian yang tidak pernah diberikan oleh masyarakat setempat, mereka hanya diberi sosialisasi tentang reboisasi bukan perizinan untuk pemancangan tata batas TNTN. Masyarakat Desa Air Hitam juga telah melakukan rapat bersama yang memohon kepada pemerintah dan pihak terkait untuk mengeluarkan Desa Air Hitam dari kawasan TNTN yang sesuai dengan tapal batas Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo, tetapi hal ini tidak direspon baik oleh pemerintah maupun pihak terkait yang membuat permasalahan ini semakin berlarut-larut. Tuntutan masyarakat hanya sebatas mengeluarkan Desa Air Hitam dari kawasan TNTN agar mereka dapat kembali mengusahakan lahan dan merawat makam nenek moyang mereka yang kini dikuasai oleh TNTN. Di sini dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan pada masyarakat dengan perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sangat dibutuhkan untuk memberikan suatu

kepastian hukum di bidang Agraria. Dalam hal ini yang tidak kalah pentingnya adalah terselenggaranya kepastian hukum terhadap masyarakat adat yang memiliki tanah di dalam kawasan TNTN agar adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Perda yang secara khusus mengatur tentang masyarakat adat Petalangan sendiri belum ada dan sedang diajukan oleh Lembaga Adat Melayu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar segera disahkan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum masyarakat adat.

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum *Rechtssicherheit*, kemanfaatan *zweckmassigkeit* dan keadilan *gerechtigkeit*.¹

Sengketa perkara tanah seperti contoh di atas sangat banyak dan sedang dalam proses penyelesaian baik melalui musyawarah adat maupun melalui pengadilan. Dalam banyak perkara dimenangkan oleh masyarakat hukum adat, karena hakim melihat peristiwa konkritnya. Hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi. Peristiwa konkrit atau kasus yang diketemukan dari jawab-menjawab itu merupakan kompleks peristiwa atau kejadian-kejadian yang harus diurai, harus diseleksi, peristiwa yang pokok dan yang relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkritnya, tentang duduk perkaranya dan akhirnya dibuktikan serta dikonstatasi atau dinyatakan benar-benar telah terjadi.²

Persoalan yang muncul, peraturan yang khusus mengenai masyarakat adat Petalangan belum ada yang mengatur. Peraturan Menteri Agraria nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan suatu

Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

a. Masih terdapat masyarakat yang terikat dengan hukum adatnya.

¹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

² Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 81.

b. Masih terdapat tanah ulayat yang masih tetap dipelihara dan menjadi tempat hidup masyarakat tersebut.

c. Terdapat pranata hukum adat mengenai tatacara penguasaan dan penggunaan tanah ulayat tersebut.

Pebbaikan Hukum Agraria secara Nasional merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi mengingat sudah begitu banyak persoalan tanah di negara ini yang tidak terselesaikan, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Ketetapan Majelis Nomor No. IX/ MPR/ 2001 mengenai Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam TAP tersebut Rakyat memberikan kekuasaan kepada pemerintah melalui instansi terkait untuk memproduksi produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjamin adanya persamaan hak untuk memperoleh sebidang tanah. Masyarakat Indonesia memerlukan suatu sistem pendaftaran tanah yang sesuai dengan asas-asas pendaftaran tanah dan oleh karena itu sistem pendaftaran tanah tersebut harus dapat dimengerti oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses pendaftaran tanah tersebut.³ Guna menyelesaikan permasalahan tanah ulayat masyarakat adat Petalangan Batin Putih Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat , dimana pemerintah daerah akan membentuk panitia masyarakat hukum adat sesuai amanat permendagri tersebut yang terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua
- b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris
- c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota
- d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota
- e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

Panitia tersebut memiliki tugas antara lain:

³ AP. Parlindungan, **Pendaftaran Tanah di Indonesia**, Mandar Maju , Bandung, 1999, hlm. 76.

- a. Melakukan identifikasi masyarakat hukum adat
- b. Melakukan verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat.
- c. Menetapkan masyarakat hukum adat.

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas adalah beberapa permasalahan hukum yang akan diteliti dan dikaji yakni sebagai berikut:

Dari latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah yang penulis munculkan yaitu :

1. Apa penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan bagaimana penyelesaiannya ?
2. Bagaimana solusi penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo ?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah hukum empiris dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan Desa Air Hitam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Pembahasan

A. Penyebab Terjadinya Sengketa Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat dan Taman Nasional Tesso Nilo Di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dan Bagaimana Penyelesaiannya

Kawasan lindung Taman Nasional Tesso Nilo membentang di dua wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Secara keseluruhan luas Kawasan lindung Taman Nasional Tesso Nilo yang dideklarasikan pada 19 Juli tahun 2004 yang memiliki luas 38.576 Ha. Namun, luasan 36.872 Ha adalah kawasan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan dan sisanya sekitar 1.706 Ha adalah kawasan yang termasuk di Kabupaten Indragiri Hulu (Berdasarkan Surat Kep No. 255/Menhut-II/2004).

Lahan kawasan lindung Tesso Nilo merupakan bekas lahan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) PT. Dwi Marta dengan masa habis izinnya pada

tahun 2001. Kemudian lahan tersebut diserahkan dan diberikan izin kepada Inhutani IV dengan masa habis izin pada tahun 2003. Setelah masa izin Inhutani IV habis, maka dilakukan lah persiapan-persiapan untuk penetapannya sebagai Taman Nasional. Artinya Taman Nasional Tesso Nilo dibentuk bukan dari hutan alam murni melainkan 50% sudah hasil tebangan. Ternyata dari luas TN Tesso Nilo 38.576 Ha itu, ada tumpang tindih lahan dengan konsesi akasia PT. Riaupulp sebesar 3.000 Ha dan perkebunan PT. Inti Indosawit sebesar 3.000-4.000 Ha (Berdasarkan kajian WWF Pekanbaru Tahun 2007).

Kawasan lindung TN Tesso Nilo juga dikelilingi oleh kawasan hutan baik itu Hutan Taman Industri maupun Hutan Alam (IUPHK-HT/HA) diantaranya PT. Nusa Wana Raya seluas 17.140 Ha, PT. Siak Raya Timber seluas 37.638 Ha, PT. Hutani Sola Lestari seluas 17.874 Ha, dan PT. Nanjak Makmur seluas 52.580 Ha. Pada tahun 2007, lahan kawasan lindung TN Tesso Nilo dan sekitarnya sudah ditebang oleh perambah liar sekitar 8.427 Ha. Sebagian besar pemanfaatan dari perambahan lahan tersebut adalah pembukaan areal perkebunan kelapa sawit masyarakat. Sedangkan jumlah masyarakat perambah yang tinggal di dalam lingkungan TN Tesso Nilo sudah mencapai 722 KK. Hal tersebut jika dihitung luas kawasan lindung TN Tesso Nilo yang berfungsi sebagai kawasan satwa gajah dan harimau dari 38.576 Ha, sekitar 14.000 Ha tidak lagi efektif menjadi kawasan lindung habitat gajah dan harimau (Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2008).

Perambahan kawasan hutan yang ada di kawasan lindung TN Tesso Nilo dan sekitarnya ini terjadi adalah salah satu disebabkan oleh adanya jalan sebagai akses kearah kawasan hutan tersebut yang dibangun oleh PT. RAPP. Bekas lahan hasil perambahan tersebut di dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, karet, dan sebagainya. Permasalahan ini terjadi dikarenakan para pemilik kawasan hutan atau perusahaan tidak memiliki tanggungjawab dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk mencegah dan melarang para perambah hutan (berdasarkan PP No. 45 tahun 2004).

Selain itu disebabkan adanya klaim dari masyarakat adat terhadap kawasan hutan yang ada di lingkungan TN Tesso Nilo dan sekitarnya dan juga disebabkan karena banyaknya para pendatang yang memberikan imeng-imeng modal untuk pembangunan kebun dengan cara membentuk kelompok tani secara efektif dengan biaya yang murah. Dimana masyarakat yang diberi jaminan tersebut adalah masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai cukong pembalakan liar atau pemodal yang tidak memperoleh lagi lahan untuk perkebunan secara legal.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain, didalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2005-2015 menjelaskan kawasan lindung didalam Kepres No.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung TN Tesso Nilo, namun dilapangan bahwa keseluruhan areal perkebunan kelapa sawit, karet dan sebagainya sektor Pelalawan berada di atas kawasan lindung. Kemudian bertentangan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 Tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan penggunaan kawasan hutan, seharusnya usaha pemanfaatan perkebunan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi. Dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap upaya pengendalian konversi kawasan lindung TN Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan yang belum maksimal.

Upaya lain yang dilakukan adalah adanya areal untuk rencana perluasan kawasan lindung TN Tesso Nilo sekitar 100.000 Ha yang terletak di kawasan hutan milik PT. Nanjak Makmur, PT. Siak Raya Timber, PT. Hutani Sola Lestari. Namun areal ini maupun sekitarnya telah terjadi kegiatan perambahan hutan. Luas perambahan terjadi hingga tahun 2007 adalah TN Tesso Nilo (8.427 Ha), PT. Nanjak Makmur (7.198 Ha), PT. Siak Raya Timber (12.374 Ha), dan PT. Hutani Sola Lestari (6.806 Ha).

Kegiatan perambahan dan konversi yang terjadi mengakibatkan kerusakan lahan pada kawasan lindung TN Tesso Nilo dan sekitarnya di Kabupaten Pelalawan sudah sangat mengkhawatirkan, kegiatan

deforestasi, degradasi pemanfaatan lahan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada dipinggiran kawasan, tetapi juga di kawasan perkebunan, PIR Trans dan pedalaman. Kondisi permasalahan tersebut perlu diadakannya arahan pengendalian penggunaan kawasan lindung guna meminimalkan konversi baik bersifat Prefentif maupun bersifat kuratif dan memberika Secara administrasi, kawasan penelitian TN Tesso Nilo terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan termasuk dalam wilayah Propinsi Riau.

Adapun sebagai batasannya adalah:

Sebelah Utara: Kecamatan Pangkalan Lesung

Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Sengingi

Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu

Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkalan Kuras

Sejak Tesso Nilo dikukuhkan sebagai taman nasional pada 2004, pemerintah pusat lalai menjaga dan merawatnya. Bupati Kabupaten Pelalawan M. Harris menunjuk pada lemahnya pengawasan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo--badan di bawah Kementerian Kehutanan. “Selama ini kami dijadikan bumper pemerintah pusat ketika para perambah masuk dan melakukan unjuk rasa pada saat penertiban,”

Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Edward Rahadian, menjelaskan, jumlah perambah saat ini mencapai 70 ribu keluarga. Sebagian besar berasal dari Sumatera Utara, sisanya dari Aceh, Lampung, Jawa dan bekas transmigran. Balai Taman Nasional mengakui keterbatasan tenaga dan biaya.⁴

TNTN awalnya kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) PT Dwi Marta, PT Inhutani dan PT Nanjak Makmur . Perusahaan tersebut diberi izin pemerintah untuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK-HA/HPH) guna mensuplai kebutuhan bahan baku plywood industri sawmill. Total luasan ketiga perusahaan

⁴ Wawancara dengan Edward Rahadian, Kepala SPTN 1 Lubuk Kembang Bungo, 28 Mei 2015.

tersebut 120.000 hektar. Tercatat PT Dwi Marta sudah ada sejak 1974. Di sekitar TNTN saat ini masih terdapat perizinan HPH yang masih aktif yaitu HPH PT. Siak Raya Timber seluas 38. 650 hektar, HPH PT. Hutani Sola Lestari seluas 45.990 hektar, HPHTI PT RAPP (Riau Andalan Pulp And Paper), PT Rimba Lazuardi, PT Rimba Peranap Indah, PT. Putri Lindung Bulan dan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Inti Indosawit Subur, PT Peputra Supra Jaya, PT Mitra Unggul Perkasa dan beberapa perusahaan lainnya.

Menurut bapak Yowel Baransano, “Sengketa yang terlihat dimulai pada tahun 2007 tetapi SK penunjukkan yang pertama pada tahun 2004 dan itu sudah mulai menimbulkan sengketa tetapi belum terlalu besar. Sejak dikeluarkannya SK menteri kehutanan tahun 2004 tentang penunjukkan tntn sebagai kawasan konservasi.”⁵ Tesso Nilo ditetapkan sebagai taman nasional melalui perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas seluas 83.068 hektar oleh Kementerian Kehutanan. Tahap pertama berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: *SK.255/Menhut-II/2004* tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha. Tahap berikutnya berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: *SK 663/Menhut-II/2009* tanggal 15 Oktober 2009 seluas + 44.492 hektar. Sebagian besar kawasan TNTN berada di Kabupaten Pelalawan dan sebagian kecil di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Kawasan ini memiliki tingkat keragaman hayati sangat tinggi. Ada sekitar 360 jenis flora tergolong dalam 165 marga dan 57 suku untuk setiap hektarnya. Tesso Nilo juga dikenal sebagai habitat bagi beraneka ragam jenis satwa liar langka, seperti Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), berbagai jenis Primata, 114 jenis burung, 50 jenis ikan, 33 jenis herpetofauna dan 644 jenis kumbang.

⁵ Wawancara dengan Yowel Baransano, staf unit pelaksana teknis dinas kehutanan kabupaten pelalawan, senin 25 mei 2015.

Menurut hasil investigasi Balai TNTN dan WWF Riau, sekitar 2.279 Kepala Keluarga telah menetap dalam kawasan TNTN: 2.176 (95 persen) KK merupakan pendatang dari luar desa sekitar TNTN dan hanya 666 KK (5%) masyarakat sekitar kawasan TNTN. Perambahan bertambah marak, hingga tahun 2009 terdapat 14 lokus perambahan, menyebar di sepanjang jalan-koridor dan pusat-pusat perkampungan. Luasnya mencapai 28.606,08, atau 34,5% dari luas TNTN. Empat lokus terluas adalah Koridor PT RAPP Ukui–Gondai (8.242,34 ha), Kuala Onangan Toro Jaya (7.769,27 ha), Bagan Limau (3.852,21 ha), dan Toro Makmur (2.440 ha).⁶

Yowel Baransano mengatakan kondisi masyarakat Batin Putih sebelum dan sesudah terjadinya sengketa mengalami perubahan “Sebelum terjadinya sengketa masyarakat tidak mengetahui jika tanah yang mereka garap adalah wilayah taman nasional tesso nilo, Sesudah terjadinya sengketa masyarakat ada yang mundur dari penggarapan lahan tetapi ada juga yang masih bertahan mengelola lahan mereka dengan mengacuhkan peringatan dari pihak taman nasional tesso nilo. Sebelum terjadinya sengketa masyarakat adat dan pendatang lebih dahulu ada disitu untuk menggarap lahan dan patuh dengan pemangku adat batin putih. Dalam hal akan menggarap lahan maka harus mendapat izin dari batin untuk diketahui oleh kepala desa setempat . Sesudah terjadinya sengketa masyarakat tidak merasa tenang karena menganggap tntn sebagai ancaman kehidupan.

Luas wilayah masyarakat Batin Putih yang diambil oleh TNTN kurang lebih 16.000 ha dan yang sudah dibuka menjadi lahan perkebunan seluas kurang lebih 8.500 ha, Yang diambil kurang lebih 17.500 ha dari total wilayah 42.000 ha, dalam pengambilan lahan oleh TNT tesso nilo, Sudah pernah diadakan musyawarah bersama masyarakat pada tahun 2011 dan masyarakat menolak keberadaan TNTN karena hanya tanah ini yang dimiliki masyarakat adat. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara

⁶ Wawancara dengan Edward Rahadian , Kepala SPTN 1 Lubuk Kembang Bungo, 28 Mei 2015

tntn dengan masyarakat adat, padahal PT sebelumnya sudah membuat kesepakatan. Belum ada penyelesaian sengketa, tetapi pada tahun 2015 ini masyarakat mulai mendiamkan dan tidak menggarap tanah yang menjadi sengketa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa penyebab terjadinya sengketa:

- a. berawal dari adanya SK penunjukan TNTN dari kementrian kehutanan
- b. masyarakat yang merambah hutan mulai ditangkap dan dipenjarakan
- c. Pihak TNTN tidak melakukan survey lokasi dan budaya setempat, dan tidak berkoordinasi saat SK dikeluarkan.

Padahal jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi maka seharusnya keberadaan masyarakat hukum adat ini di lindungi karena mereka masih memiliki budaya-budaya leluhur di tempat itu.

Sebagaimana termaktub dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa” *negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup*”.

Keberadaan mereka masih dapat ditemui dengan adanya upacara adat yang masih berlangsung, sanksi adat yang masih ditegakkan, dan tanah ulayat mereka yang masih ada.

Status tanah ulayat mereka sendiri dibuktikan dengan adanya *tombo* atau buku yang berisi tentang sejarah, batas-batas wilayah dan kepengurusan adat mereka, secara hukum mereka tidak memiliki bukti tertulis berupa sertifikat tetapi *tombo* yang ada dapat digunakan untuk menjelaskan status kepemilikan tanah ulayat mereka.

Saat ini tanah ulayat mereka difungsikan sebagai lahan pertanian yang dikelola oleh *anak kemenakan*. Tanah mereka digunakan secara bersama atau komunal yang di pimpin oleh seorang *batin* atau kepala adat.

Pihak TNTN sendiri mengklaim tanah ulayat itu sebagai kawasan mereka berdasarkan surat penetapan dari kementerian kehutanan, dan mereka tidak memiliki kuasa untuk dapat melepaskan sebagian kawasan konservasinya. Pihak TNTN meminta kepada masyarakat hukum adat bukti tertulis atas kepemilikan tanah ulayat tersebut agar dapat dijadikan pertimbangan untuk dapat mengelola lahan tanpa dianggap merambah kawasan konservasi.

B. Solusi Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat dan Taman Nasional Tesso Nilo

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ternyata di lapangan belum dilakukan penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Karena aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah.

Suatu perlindungan hukum hendaknya didapat oleh semua subjek hukum tanpa perbedaan apapun. Sebagaimana tertuang pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 27 ayat (1). Serta pada pasal berikut: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.⁷

Hal ini dapat pula diartikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum dan tidak ada suatu hal yang menjadikan sebagai alasan pembedanya. Dengan adanya suatu perlindungan hukum, maka hak-hak dari subjek hukum akan dilindungi. Dengan demikian maka subjek hukum akan merasa aman, dan nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Satjipto Rahardjo pada bukunya yang berjudul Ilmu Hukum mengatakan bahwa suatu perlindungan hukum dapat diartikan

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat (1).

memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, dan tujuan perlindungan hukum adalah memberikan masyarakat suatu rasa nyaman dan aman untuk menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum. Dari teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini dapat diartikan pula bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal yang bersifat melindungi subjek hukum dari hal-hal merugikan yang dilakukan oleh subjek hukum lainnya.

Sampai saat ini memang belum ada penyelesaian sengketa yang dilakukan namun sudah ada beberapa usaha yang dilakukan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Merujuk pada beberapa alternatif penyelesaian sengketa seharusnya mediasi dapat dilakukan karena mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution.

Karena penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa yang ada selama ini belum memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya diklaim oleh TNTN.

Suatu perlindungan hukum hendaknya didapat oleh semua subjek hukum tanpa perbedaan apapun. Sebagaimana tertuang pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 27 ayat (1). Serta pada pasal berikut : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.⁸

Hal ini dapat pula diartikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum dan tidak ada suatu hal yang menjadikan sebagai alasan pembedanya. Dengan adanya suatu perlindungan hukum, maka hak-hak dari subjek hukum akan dilindungi.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat (1).

Dengan demikian maka subjek hukum akan merasa aman, dan nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Dari teori yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dapat diambil kesimpulan bahwa seharusnya perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat Batin Putih atas perbuatan pihak TNTN yang merugikan. Dan perlindungan hukum tersebut dapat diberikan oleh berbagai pihak salah satunya adalah pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pelalawan, agar dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah ulayatnya, salah satu cara yaitu dapat dibuat Perda yang mengatur dan mengakui adanya masyarakat hukum adat di Kabupaten Pelalawan.

C. Solusi Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dan Taman Nasional Tesso Nilo Di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Secara Pasti Jumlah masyarakat adat tidak diketahui karena adanya prinsip anak kemenakan, jadi masyarakat adat yang bukan masuk wilayah desa air hitam masih dapat mengelola lahan dikarenakan adanya pemekaran wilayah desa air hitam. Tetapi tanah ulayat tidak dapat dimekarkan, hanya domisili masyarakatnya yang bisa dimekarkan, jadi belum dapat didata berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Masyarakat adat yang masih tinggal di desa air hitam berjumlah kurang lebih 300 Kepala keluarga. Menurut pemangku adat penyelesaian yang tepat sebaiknya dilakukan mediasi antara tntn dan masyarakat adat.

Menurut tokoh adat di desa air hitam menjelaskan:

“Sudah beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat di dprd, menyampaikan kepada dirjen PHKA untuk dapat mempertimbangkan masyarakat yang mengelola tanah tersebut dan mereka harus dapat membuktikan hak milik mereka, pendatang tidak dapat diakomodir, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang jelas⁹

⁹ Wawancara dengan Eka Putra, ketua komisi 1 DPRD Pelalawan, 26 mei 2015

Solusi penyelesaiannya: program pemerintah seharusnya memperhatikan kearifan lokal yang masih terjaga dan pemerintah harus turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan semua dana ditanggung pemerintah pusat. Jangan hanya membuat kebijakan tetapi harus melihat ke daerah, pemerintah daerah hanya mengakomodir aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pusat karena pusat yang bertanggung jawab .

Persoalan tanah ini kebanyakan adalah warisan dari pemerintahan yang terdahulu dan langsung mengeluarkan izin tanpa melihat kondisi, mereka hanya melihat peta tanpa mengetahui bahwa disitu ada penduduk yang tinggal, tanah yang berada dalam kawasan tntn tidak boleh diperjual belikan, masyarakat belum merasakan manfaat dari adanya tntn karena belum ada kontribusi yang nyata dari TNTN untuk masyarakat, seharusnya tntn menjelaskan visi dan misi kepada masyarakat.

Jadi perlu dilakukan pengukuran ulang. Pasalnya, perluasan TNTN telah merampas lahan yang sejak dulu digunakan masyarakat untuk perkebunan," "Perlu ada solusi bersama atas persoalan ini," Menurut dia, konflik berkepanjangan dalam pengelolaan taman nasional itu terjadi karena pemerintah tidak pernah melakukan pengecekan fisik di lapangan. "Ini terjadi dalam banyak kasus. Membuat SK suatu wilayah sebagai kawasan hutan, tapi tidak pernah melihat kondisi fisik di lapangan. Bahkan rekomendasi yang dibuat oleh tim terpadu, tidak pernah mau disahkan. Pemerintah hanya mengandalkan citra satelit, tanpa mau turun langsung ke lapangan," katanya.¹⁰

Jadi untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat harus di selesaikan dengan pendekatan yang bersahabat dan saling menguntungkan. Dengan adanya rasa keuntungan bagi masyarakat akan keberadaan Taman Nasional tersebut maka

¹⁰ Wawancara dengan Eka Putra, ketua komisi I DPRD Pelalawan, 26 Mei 2015.

masyarakat akan beralih untuk menjaga kelestarian hutan pada Taman Nasional Tesso Nilo tersebut.

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam memberdayakan masyarakat tersebut adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo, seperti melibatkan atau mengambil masyarakat sekitar menjadi polisi hutan yang bertugas untuk menjaga Taman Nasional. Selain melibatkan beberapa anggota masyarakat dalam keanggotaan polisi hutan juga bisa melibatkan masyarakat dalam beberapa kegiatan Taman Nasional seperti *Flying Squad* atau kesatuan pelindung gajah liar. Serta melibatkan masyarakat pada kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam keanggotaan pengelolaan Taman Nasional, maka masyarakat akan merasa memiliki hutan tersebut serta dalam segi ekonomi masyarakat merasa terpenuhi dengan gaji anggota yang dibayarkan oleh pengelola.

Selain melibatkan masyarakat dalam keanggotaan, pihak Taman Nasional juga dapat memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Jadi, pengelola Taman Nasional membantu dan membuka jalan bagi masyarakat untuk melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu serta membantu dalam pemasarannya, seperti madu, tanaman obat-obatan dan lain-lain.

Jadi dalam mengatasi kerusakan hutan yang diakibatkan masyarakat harus dapat diatasi dengan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian kelestarian hutan di Taman Nasional Tesso Nilo akan tetap terjaga. Di Taman Nasional Tesso Nilo, WWF telah memfasilitasi terbentuknya forum masyarakat yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan taman nasional tersebut. Forum yang dinamakan “Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo” merupakan wakil dari 22 desa disekitar kawasan lindung Tesso Nilo. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengembangkan cara-cara baru yang lestari dalam pemanfaatan hutan secara ekonomis, mengantisipasi dan mengurangi konflik, serta meningkatkan kesadaran diantara

masyarakat lokal tentang pentingnya konservasi. Upaya ini mencakup dukungan terhadap pengembangan ekoturisme dan produksi madu sialang sebagai pendapatan alternatif bagi masyarakat. Forum ini juga berada d belakang Flying Squad Tesso Nilo, tim gajah dan pawang terlatih yang bertugas mengusir gajah liar dari kebun dan lahan masyarakat untuk kembali ke hutan sehingga meminimalisir konflik gajah-manusia di sekitar taman nasional.

Di era reformasi dan keterbukaan informasi publik dewasa ini menuntut semangat demokrasi dan transparansi membangkitkan keberanaian komunitas masyarakat untk menuntut kesetaraan dan penyelesaian atas apa yang kemudian dirasakan sebagai ketidak adilan yang kemudian tidak memberikan kepastian hukum ditengah masyarakat terutama terkait dengan penguasaan atas sumber daya alamnya, sehingga berujung pada konflik sosial antara masyarakat dengan pemerintah.

Konflik berasal dari kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.¹¹

Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan cirri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya cirri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.¹²

¹¹ Bernard Limbong, **Konflik Pertanahan**, Pusaka Margareta, Jakarta , 2012, hlm. 29.

¹² *Ibid.*, hlm. 29.

Untuk membahas masalah tentang penyelesaian sengketa antara masyarakat adat Batin Putih dengan TNTN penulis menggunakan teori konflik. Teori ini memiliki empat asumsi dasar diantaranya adalah:

- a. Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat
- b. Masyarakat cenderung mengalami perubahan. Dalam setiap perubahan, peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi.
- c. Selalu ada kompetisi untuk terjadinya perubahan.
- d. Dalam kompetisi itu, penggunaan kekuasaan dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.¹³

Dari asumsi diatas penulis menyimpulkan bahwa sengketa ini terjadi karena pihak TNTN mempunyai kekuasaan dan peranan penting dalam masyarakat karena keberadaannya dikukuhkan oleh kementerian kehutanan sedangkan masyarakat hukum adat sendiri tidak memiliki sertifikat yang diakui secara hukum atas kepemilikan tanahnya, padahal sudah banyak peraturan yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat.

Adapun cara penyelesaian sengketa atau konflik dapat dilakukan melalui proses peradilan, ADR (*alternative dispute resolution*) dan melalui lembaga adat. Ada lima cara yang dilakukan apabila melalui ADR yaitu:

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Penilaian ahli

Dari kelima cara diatas, mediasi merupakan alternative penyelesaian yang paling tepat karena selain itu yang dikehendaki kedua belah pihak, mediasi juga dapat memberikan solusi dalam

¹³ Indah Sri Utari, **Aliran dan Teori dalam Kriminologi**, Thafa Media , Yogyakarta, 2012, hlm. 113.

penyelesaian sengketa dimana kedua belah pihak melakukan pertemuan dan berunding menyelesaikan masalah tanpa campur tangan pihak ketiga.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan setelah dilakukan mediasi yaitu:

1. melibatkan atau mengambil masyarakat sekitar menjadi polisi hutan yang bertugas untuk menjaga Taman Nasional.
 2. memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu misalnya madu dari pohon sialang yang banyak tumbuh di TNTN
 3. memberdayakan masyarakat dengan membuat resort atau penginapan di sekitar TNTN.
- Jika hal-hal diatas dilakukan oleh TNTN maka sengketa yang ada dapat diminimalisir.

Simpulan

1. a. Penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan bermula ketika tahun 2004 pemerintah menetapkan kawasan hutan tesso nillo sebagai Taman Nasional Tesso Nillo padahal di dalam kawasan hutan tersebut masyarakat adat petalangan batin putih menngantungkan hidup dan kehidupannya,
- b. penyelesaian yang terjadi dilapangan belum ada sehingga belum memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat batin putih
2. model penyelesaian sengketa yang tepat antara mayarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo dapat dilakukan melalui mediasi dengan solusi penyelesaian sebagai berikut :
 - (1) melibatkan atau mengambil masyarakat sekitar menjadi polisi hutan yang bertugas untuk menjaga Taman Nasional.
 - (2) memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu misalnya madu dari pohon sialang yang banyak tumbuh di TNTN.
 - (3) memberdayakan masyarakat dengan membuat resort atau penginapan di sekitar TNTN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AP. Parlindungan, 1999, **Pendaftaran Tanah di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung.

Bernard Limbong, 2012, **Konflik Pertanahan**, Pusaka Margareta, Jakarta.

Indah Sri Utari, 2012, **Aliran dan Teori dalam Kriminologi**, Thafa Media, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, **Penemuan Hukum**, Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.